

ABSTRAK

MUHAMMAD FIKRI AKBAR NURAZIZ: *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.*

Penelitian ini membahas tentang implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar. Dalam realitanya implementasi keterbukaan informasi publik ini masih belum berjalan secara optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, mengetahui faktor penghambat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar dan juga mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat proses implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa implementasi keterbukaan informasi publik berjalan secara optimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori *Good Governance*, Teori Kebijakan Publik dan Teori Evaluasi Kebijakan Publik.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis secara data *kualitatif*. Penelitian ini dilakukan di Diskominfo Kota Banjar.

Melalui penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa: *Pertama*, Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Banjar mengalami peningkatan melalui peningkatan media yang digunakan. *Kedua*, Ada beberapa faktor penghambat, faktor-faktor yang mempengaruhinya dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dengan nama *A Model of The Policy Implementation* yakni 1. Standar dan Sasaran Kebijakan; 2. Sumber Daya Kebijakan; 3. Karakteristik Pelaksana Kebijakan; 4. Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan; 5. Sikap Para Pelaksana Kebijakan; dan 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang kelima faktor itu memiliki problemnya tersendiri. *Ketiga*, Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam proses implementasi ini yakni dengan cara memberikan pemahaman kepada badan publik berkaitan dengan Kewajiban badan publik untuk menginformasikan segala hal yang menjadi Informasi Publik kepada masyarakat umum. Disisi lain, perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik ini karena merupakan hak daripada masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Keterbukaan Informasi Publik